

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK
MELALUI DIVERSI
(Studi Kasus Wilayah Hukum Sukoharjo)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata I pada

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

WIDI FAMALIYA RACHMA
C100130270

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK
MELALUI DIVERSI
(Studi Kasus Wilayah Hukum Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**WIDI FAMILIYA RACHMA
C100130270**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
NIK. 536**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK
MELALUI DIVERSI
(Studi Kasus Wilayah Hukum Sukoharjo)**

Yang ditulis oleh:

**WIDI FAMILIYA RACHMA
C100130270**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal : 23 Maret 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
2. Sekretaris : Hartanto, SH., M.Hum
3. Anggota : Kuswardani, S.H., M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
NIK. 536

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Februari 2017

Penulis



WIDI FAMILIYA RACHMA
C100130270

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK
MELALUI DIVERSI
(Studi Kasus Wilayah Hukum Sukoharjo)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi dan untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Kepolisian Resort Sukoharjo dan kediaman ketua RT tempat tindak pidana terjadi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian dianalisis kualitatif melalui berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi telah dilakukan pada tingkat penyidikan, sebagian besar berhasil dan ada yang gagal sehingga dilimpahkan ke tingkat penuntutan dan ke tingkat pengadilan dengan berakhir melalui sistem peradilan pidana, sedangkan faktor yang menjadi hambatan penyelesaian diversi yakni pelaku tidak mengakui perbuatannya ataupun berbelit dalam memberikan keterangan dan pada tingkat penyidikan belum adanya penyidik khusus anak, fasilitas ruang khusus untuk mediasi serta penempatan anak sementara belum tersedia di wilayah hukum Sukoharjo.

Kata kunci: *penanganan perkara, peradilan pidana anak, diversi*

ABSTRACT

This study aims to determine the completion of criminal cases against children through diversion and to determine what factors are becoming obstacles in solving criminal cases against children through a diversion of the offenses against children in the jurisdiction of Sukoharjo. The research method used juridical empirical method descriptive research sites in Sukoharjo Police Resort and residence of the RT a criminal offense occurred. The data source consists of primary data is the result of interviews and secondary data, legal data primary, secondary and tertiary. Data were collected by literature study and field studies (interviews) and analyzed qualitatively through deductive thinking. The results showed that the completion of criminal cases against children through diversion has been done at the level of investigation, most successful and have failed so delegated to the level of prosecution and to the court level with an end through the criminal justice system, while factors that are barriers to the completion of the diversion that the perpetrator does not confess or kink in providing information and the level of investigation is not their child's special investigator, facility dedicated space for mediation and temporary placement of a child is not yet available in the jurisdiction of Sukoharjo.

Keywords: *handling the case, juvenile justice, diversion*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman kenakalan anak telah memasuki ambang batas yang sangat memperihatinkan. Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Wagianti Soetodjo, berpendapat mengenai kenakalan anak atau (*juvenile deliencya*) adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.”¹

Kenakalan anak yang melakukan perbuatan pidana dan masalah penegakan hukum pidana pada anak seperti yang terjadi di Kabupaten Majalengka pada bulan Januari 2003 terjadi peristiwa seorang anak berumur 14 tahun yang ditahan Polsek Sumber Jaya dengan tuduhan mencuri rokok, tewas karena gantung diri pada hari pertama ia masuk sel tahanan. Kasus Penganiayaan yang didakwakan kepada Raju kelas 3 Sekolah Dasar disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat Langkat Sumatera Utara sejak permulaan sidang diberi cap anak nakal oleh hakim yang mengadili. Raju sempat ditahan karena memberikan keterangan berbelit-belit di muka sidang, dan pada akhirnya diputus bersalah dengan divonis tindakan dikembalikan pada orang tuanya, namun akibatnya menjadi trauma.²

Pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga

¹ Wagianti Soetodjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Adhitama, hal. 11.

² *Ibid*, hal. 132.

permasyarakatan (LAPAS) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.³

Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Seperti efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.⁴

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya Kepolisian untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, yaitu dengan Diversi (*Diversi*).⁵ Sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ (*"The Beijing Rules"*) sebagai Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice/SMRJJ*) atau *The Beijing Rules*. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁶

Proses diversifikasi dapat melibatkan masyarakat. Terutama masyarakat Jawa masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang berorientasi kerukunan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat sesama manusia maka dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa hukum dengan perdamaian yang dilakukan dengan musyawarah,⁷ dimana dapat dilakukan di rumah keluarga korban, atau di rumah aparat pemerintahan setempat semacam RT atau RW.

³ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 3.

⁴ *Ibid.*, hal. 3.

⁵ *Ibid.*, hal. 4.

⁶ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hal. 113.

⁷ Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 118.

Penyelesaian secara damai atau kekeluargaan akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat daripada melalui lembaga peradilan.⁸

Penjelasan diversi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.*” Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu: (1) Bagaimana penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo? dan (2) Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo, dan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat teoritis, yakni menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi, dan (2) Manfaat praktis, yaitu: (a) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi, (b) Memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi, dan (c) Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan

⁸ *Ibid.*, hal. 121.

⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 41.

keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.¹⁰ Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Kepolisian Resort Sukoharjo dan kediaman ketua RT tempat tindak pidana terjadi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, dan data hukum sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian dianalisis kualitatif melalui berfikir deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Diversi di Wilayah 3 Hukum Sukoharjo

Sebelum memaparkan lebih jauh pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana anak, terlebih dahulu perlu dipaparkan jenis tindak pidana anak yang terjadi di wilayah hukum Sukoharjo dimana kasus yang terjadi di masyarakat. Terdapat contoh mengenai kasus pencurian yang dapat diselesaikan lewat masyarakat. Dalam menangani kasus yang terjadi di lingkungan sekitar sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah, di mana dalam penyelesaian pihak yang hadir orang tua pelaku, RT, RW, dan perangkat desa sebagai penasihat dan penengah.¹¹ Tindak pidana anak yang terjadi di wilayah hukum Sukoharjo paling banyak adalah kasus penganiayaan dan pencabulan. Tahun ke tahun jumlah kasus yang diselesaikan oleh unit PPA jumlah per tahun sama besar. Rata-rata umur yang melakukan 13 tahun di bawah

¹⁰ Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 4.

¹¹ Sutrisno, Ketua RT Desa Sanggrahan Makamhaji, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 8 Oktober 2016, pukul 19.30 Wib.

18 tahun. Jika korban adalah perempuan atau anak-anak, maka penanganan kasus dilaksanakan oleh Unit PPA, walaupun pelaku bukanlah anak di bawah umur.¹² Unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya di singkat unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹³

Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang merumuskan kewenang diskresi Kepolisian, kewenangan ini merupakan pengadaaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, dan dalam TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian yang menegaskan mengenai suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Kebijakan untuk menerapkan diskresi dan diversi juga terdapat dalam TR Kabareskrim Polri No. Pol. TR/359/DIT.I/VI/2008 tentang Penanganan Anak Berhadapan Hukum, TR Kapolda Jateng No.Pol.STR/215/III/2009 yang ditujukan kepada Kapolwiltabes Semarang, Kapolwil Jajaran Polda Jateng, Kapoltabes Surakarta, Kapolres/Ta Jajaran Polda Jateng salah satunya merumuskan mengenai kriteria tindak pidana anak yag diterapkan dalam diversi dan bentuk-bentuk program diversi.

Diversi dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah antara lain: (1) Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS), (2) Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan Penyidik diterima, (3) Penyidik wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh)

¹² Wijeng Rahayu, Penyidik Pada Kantor Polisi Di Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 7 Oktober 2016, Pukul 10.30 Wib.

¹³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian NRI No.pol 10 tahun 1007.

hari setelah dimulainya diversi, (4) Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka Polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi dan Penyidik membuat berita acara proses diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan berita acara penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum.

Selanjutnya (5) Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, (6) Apabila diversi gagal, penyidik membuat berita acara diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat dari petugas Pembimbingan Kemasyarakatan/Bapas.¹⁴

Mengenai penyelesaiannya dalam hal tersebut didasarkan dengan adanya pengaduan atau laporan dan diterima maka dibuatkan berita acara klarifikasi - surat visum - cukup bukti maka naik ke proses sidang – penyidikan - diberikan pengarahannya untuk menggunakan diversi apabila diversi berhasil maka selesai dan dimintakan penetapan ke Pengadilan serta apabila diversi gagal akan naik ke tahap penuntutan dan peradilan. Penahanan dilakukan 7 hari perpanjangan 8 hari dimana

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hal. 117.

ini dihindari jangan sampai di tahan, lihat kondisi seperti lingkungan pelaku, kasus di Sukoharjo anak tidak sampai dilakukan penahanan, restoratif justice tercapai dengan musyawarah antara kedua belah, di mana PPA mendampingi korban, tersangka didampingi oleh BAPAS. Selanjutnya pada kasus penganiayaan masih dalam proses sidik dari tahun 2015 anak duduk di bangku kelas 3 SMP, sampai sekarang belum selesai karena anak tersebut akan mengikuti ujian sekolah maka proses dipending dimana anak ini sekarang sudah masuk SMA dan dilanjut prosesnya lagi. Pihak-pihak yang biasa terlibat dalam kasus anak di Wilayah Hukum Sukoharjo adalah Unit PPA, Bapas, PPT Permata Kab.Sukoharjo, Perangkat desa, dan RT/RW.¹⁵

Pada tingkatan penyelesaian di masyarakat menyelesaikan permasalahan tersebut maka mengundang tokoh masyarakat terutama RT, RW dan perangkat desa dari kalurahan untuk menengahi masalah yang sedang terjadi agar memberikan solusi mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah tokoh masyarakat hadir maka diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia dan terutama di Pulau Jawa di mana telah mengenal musyawarah sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah.

Kasus pada tingkat penyidikan melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban pada perbuatan penganiayaan yang terjadi di lingkungan sekolah saat jam pelajaran kosong, awalnya hanya bercanda tetapi sampai menyebabkan korban meninggal dunia. Ini merupakan kasus menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dimana pihak dari korban tidak terima. Tetapi dengan diterapkannya proses diversi ini para pihak berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai proses dengan tidak menempuh jalur formal dan proses ini berhasil dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas maka pada proses penyelesaian di lingkup masyarakat dan pada tingkat penyidikan menggunakan musyawarah, diversi merupakan sebuah proses menyelesaikan dengan musyawarah, tetapi pada tingkat penyidikan dengan berhasilnya proses tersebut akan diberikan penetapan oleh

¹⁵ Wijeng Rahayu, Penyidik pada Kantor Polisi di Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 7 Oktober 2016, Pukul 10.30 Wib.

pengadilan tentang kesepakatan diversi dan penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

3.2 Faktor Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Diversi di Wilayah Hukum Sukoharjo

Berdasarkan penelitian hambatan yang dihadapi oleh ketua RT dan Unit PPA Polres Sukoharjo dalam menerapkan *restorative justice* sebagai penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum. Hambatan penyelesaian adalah pihak keluarga korban ataupun korban tidak terima karena tidak adanya hukuman bagi pelaku serta adanya ketakutan akan mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan karena hanya ganti dan permintaan maaf dari pelaku saja.¹⁶

Keberhasilan proses diversi sangat tergantung dari keluarga korban yang ingin menggunakan penyelesaian lewat jalur formal/litigasi karena mereka menganggap bahwa lewat jalur litigasi lebih membuat efek jera bagi pelaku, pelaku tidak mengakui perbuatannya ataupun berbelit dalam memberikan keterangan maka perlunya pendekatan orang tua pelaku berusaha menutup-nutupi perbuatan yang telah diperbuat oleh anaknya, adanya tuntutan materi yang terlalu besar, serta adanya sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversi dan menganggap diversi belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya serta ganti kerugian yang kurang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan. Pandangan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁷

Hambatan terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) Pengetahuan hukum masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum, (2) Harus paham,

¹⁶ Sutrisno, Ketua RT Desa Sanggrahan Makamhaji, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 8 Oktober 2016, pukul 19.30 Wib.

¹⁷ Wijeng Rahayu, Penyidik pada Kantor Polisi di Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 7 Oktober 2016, Pukul 10.30 Wib.

masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang, (3) Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral, dan (4) Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸

Selain faktor dari masyarakat, hambatan ini juga terjadi karena adanya faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto adalah sistem yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep mengenai apa yang dianggap buruk.¹⁹ Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima. Hambatan berikutnya yang dapat menghambat penerapan proses *restorative justice* adalah kurangnya peraturan serta terbatasnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya proses *restorative justice*. Menurut Soerjono Soekanto tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Oleh karena itu pemerintah perlu melengkapi semua kekurangan yang ada dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan konsep *restorative justice*, misalnya Kepolisian, Bapas, Bapermas, dan LSM, agar proses diversi dapat berjalan dengan maksimal.

Hambatan lain seperti terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan *restorative justice* seperti ruang mediasi untuk musyawarah, ruang khusus untuk anak dan lembaga penempatan anak sementara serta belum tersedianya penyidik anak dimana dalam penyidikan dilakukan oleh polwan, pandangan masyarakat terhadap *restorative justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan memberikan hukuman atau pidana, sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 45.

¹⁹ *Ibid.*, hal 60.

Solusi terhadap hambatan adalah dengan menjelaskan kepada para pihak untuk diselesaikan dengan musyawarah dimana pelaku harus meminta maaf dan mengganti rugi kepada korban dan keluarga korban, adanya pihak ketiga seperti Ketua Rt, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat untuk mengarahkan dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik Serta manfaat dengan diadakan musyawarah adalah agar diupayakan tidak masuk kejalur proses peradilan dan agar tercipta ketertiban dan kerukunan antar warga masyarakat.²⁰

Mengenai solusi yang dapat diberikan adalah memberikan pengertian kepada para pihak baik korban maupun pelaku tetapi lebih kepada korban, dijelaskan mengenai diversi tersebut. Apabila pelaku tidak ingin mengakui perbuatan yang telah diperbuat maka perlunya pendekatan kepada anak tersebut, Serta manfaat dari penerapan diversi ini adalah untuk menghindari trauma anak, timbul belang-belang anak dimana kebanyakan masyarakat menganggap anak nakal, bahwa sebenarnya itu tidak boleh.²¹

Manfaat pelaksanaan perogram diversi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut:²² (a) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin; (b) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban, dan masyarakat; (c) Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari; (d) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab; (e) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban; (f) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut; (g) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan; (h) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara; (i) Pengendalian kejahatan anak/remaja.

²⁰ Sutrisno, Ketua RT Desa Sanggrahan Makamhaji, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 8 Oktober 2016, pukul 19.30 Wib.

²¹ Wijeng Rahayu, Penyidik pada Kantor Polisi di Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 7 Oktober 2016, Pukul 10.30 Wib.

²² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 113.

Tidak hanya kasus penganiayaan yang berhasil tetapi kasus yang dilakukan oleh siswa kelas 5 SD MIM Ngombakan melakukan perbuatan membakar tirai atau gordena yang berada pada ruang kelas 5 dan kelas 6, alasan melakukan perbuatan tersebut karena sering dibully oleh teman sekolahnya. Setelah dilakukan visum et repertum pelaku tersebut mengalami gangguan fungsi jiwa yang sedang sebab sedang mengalami stres atau tekanan jiwa dalam taraf sedang, sehingga dalam berfikir anak mempunyai kekurangan tidak seperti layaknya anak pada umumnya ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaku berani melakukan perbuatan ini. Maka anak perlu dilakukan perlakuan khusus karena kurangnya kemampuan dalam berfikir sekaligus bertindak, dan kasus ini diselesaikan dengan mediasi secara kekeluargaan permintaan dari kepala sekolah SD Mim Ngombakan, dengan tercapainya proses ini maka proses perkara dihentikan demi hukum.

Perkara yang tidak berhasil dalam penerapan proses diversifikasi ini mengenai perbuatan pencabulan dimana anak sebagai korban dan pelaku adalah orang tua dari anak yang menjadi korban. Ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela karena ayah kandung melakukan tindakan yang tidak beretika terhadap anak kandungnya sendiri. Anak ini telah berumur 19 tahun tetapi dia mempunyai kekurangan yaitu mengalami cacat fisik dan mental maka tidak dapat memberontak atau melawan. Supaya membuat jera pelaku maka harus dilakukan proses selanjutnya karena sudah tidak bisa lagi untuk diselesaikan melalui kekeluargaan, sebab kerugian atas perbuatan tersebut sangat besar, membuat trauma anak dan anak tersebut mempunyai kemampuan yang tidak normal maka akan lebih sulit untuk melakukan rehabilitasi ataupun menyembuhkan trauma yang dialami. Karena dalam proses penyidikan telah terbukti untuk dapat di tingkatkan ke Tahap Penuntutan dan dapat diadili yang seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian kasus yang telah diuraikan di atas maka sebagian besar tindak pidana terhadap anak ini telah mampu diselesaikan dengan proses diversifikasi walaupun ada hambatan seperti pihak yang menjadi korban tidak terima tetapi dengan diberikan solusi terhadap hambatan yaitu dengan diberikan pengertian

oleh yang menengahi permasalahan tersebut seperti Rt, Rw, perangkat desa pada tingkatan dimasyarakat dan PPA, BAPAS pada tingkat Penyidikan.

4. PENUTUP

Pertama, penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi tingkat penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan sebagai berikut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan Hukum, TR Kabareskrim Polri No. Pol. TR/359/DIT.I/VI/2008 tentang Penanganan Anak Berhadapan Hukum, TR Kapolda Jateng No.Pol.STR/215/III/2009 yang ditujukan kepada Kapolwiltabes Semarang, Kapolwil Jajaran Polda Jateng, Kapoltabes Surakarta, Kapolres/Ta Jajaran Polda Jateng. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.

Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik membuat berita acara diversi dan kesepakatan diversi yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dan penyidik akan menerbitkan penetapan penghentian penyidikan. Dalam hal diversi gagal penyidik membuat berita acara diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum.

Kasus yang penulis bahas, diversi telah dilakukan pada tingkat penyidikan sebagian besar berhasil dan ada yang gagal sehingga dilimpahkan ke tingkat penuntutan dan ke tingkat pengadilan dengan berakhir melalui sistem peradilan pidana. Alasan adanya kegagalan dalam upaya diversi karena kasus yang terjadi sangat merugikan dan mengancam jiwa, psikis korban. serta pada tingkat masyarakat telah menerapkan kebudayaan musyawarah dimana dalam penyelesaian pihak yang hadir orang tua pelaku, RT, RW, dan perangkat desa sebagai penasihat dan penengah.

Kedua, faktor penghambat penerapan diversi terhadap anak di wilayah hukum Sukoharjo. Peneliti dapat menyimpulkan hambatan yang dirasakan

penyidik adalah keluarga korban menganggap proses diversi ini kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Pelaku tidak mengakui perbuatannya ataupun berbelit dalam memberikan keterangan maka perlunya pendekatan orang tua pelaku berusaha menutup-nutupi perbuatan yang telah diperbuat oleh anaknya, adanya tuntutan materi yang terlalu besar. Selain itu pada tingkat penyidikan ini belum adanya penyidik khusus anak, fasilitas ruang khusus untuk mediasi dan penempatan anak sementara belum tersedia.

Untuk menanggulangi hambatan tersebut dikemukakan solusi yaitu dengan memberikan pengertian terutama pihak keluarga korban mengenai proses diversi karena proses ini lebih bermanfaat dari pada membawa kejalur formal. Penyidikan oleh anak apabila belum ada dapat ditunjuk penyidik dewasa sesuai aturan perundang-undangan. Dengan berhasilnya proses diversi ini membawa manfaat seperti mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan trauma, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pertama, bagi orang tua, seharusnya mendidik anak dari kecil dengan memberikan pengertian mengenai perbuatan baik dan buruk. Terutama bagi orang tua pelaku tidak boleh menutup-nutupi perbuatan yang telah diperbuat oleh anak tersebut, dan untuk orang tua korban harus menggunakan upaya diversi karena upaya diversi lebih mendatangkan manfaat terutama bagi pelaku anak.

Kedua, bagi penyidik, penyidikan merupakan proses paling utama maka harus dilakukan mengupayakan penerapan diversi. Dan seharusnya segera dibentuk atau ditunjuk penyidik khusus anak terutama telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak serta harus memahami proses diversi lebih dalam lagi terutama saat praktek juga selalu melibatkan badan permasyarakatan.

Ketiga, bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta Lembaga Permasyarakatan harus diberikan pengawasan agar diversi berjalan dengan lancar serta tidak ada penyalahgunaan dari para aparat. Serta peran lembaga permasyarakatan harus diperkuat kedudukannya agar tidak hanya menjadi rekomendasi. Perlunya sosialisasi mengenai diversi kepada aparat penegak hukum

dan pihak-pihak terkait terutama masyarakat agar mengetahui proses dan manfaat dari diversi ini.

Persantunan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Dr.Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum selaku dekan dan pembimbing skripsi. Orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Adek tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya. Saudara-saudaraku terimakasih atas do'a, dorangan dan semangatnya. Serta untuk Sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soetedjo, Wagati dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Adhitama.

Surbakti, Natangsa, 2014, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.